



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA *Tahun 2023*



☎ 021-31966163

🌐 ptun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [ptun.jakarta.117](https://www.instagram.com/ptun.jakarta.117)

✉ ptun.jakarta@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.
NIP. 19660508198803 2 002



Jakarta, 25 Januari 2023
Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610198503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi. c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	90% 35% 80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Anggaran

- Rp. 15.958.194.000
Rp. 53.400.000
Rp. 179.216.000

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara



Hj. LULIK YULIYANTI WIDAYANINGRUM, S.H., M.H.
NIP. 19630508 198803 2 002

Jakarta, 25 Januari 2023
Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR :W2-TUN/ 292 /KP3.4.1/I/2023

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- Menimbang : a. Bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.;
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2023, maka perlu penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

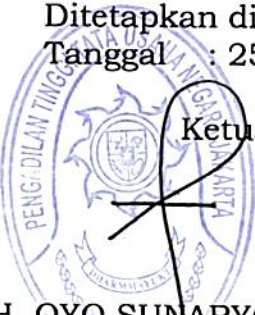
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2023;
- Kesatu : Menetapkan Perjanjian Kinerja , sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Januari 2023

Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1001



☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com